

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Pangan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Salah satunya adalah kebutuhan akan beras, di Indonesia beras merupakan salah satu makanan pokok. Setelah beberapa tahun terakhir ini, petani banyak yang mengalami gagal panen yang diakibatkan oleh berbagai macam bencana, seperti musim kemarau yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan supaya warga Indonesia tidak selalu bergantung pada beras. Sedangkan kondisi alam di Indonesia adalah termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi, walaupun negara Indonesia kaya akan sumber daya alam, kita tetap mengimpor pangan. Indonesia masih belum biasa untuk memenuhi kebutuhan pangan di negeri sendiri, sehingga pemerintah perlu untuk melakukan impor beras guna mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Ada beberapa tujuan pemerintah mengimpor beras, di antaranya yaitu : Desakan impor, pada dasarnya bertujuan agar kuota beras akhir tahun Indonesia masih mencukupi maka mau tidak mau pemerintah harus mengimpor beras. Beberapa tahun ini, Indonesia terjerat desakan impor beras ke Vietnam yang ternyata diselewengkan oleh oknum importir. Untuk menahan laju inflasi, Beras dianggap komoditi terpenting sebagai indikator pergerakan inflasi, karena beras merupakan makanan pokok sehari – hari rakyat Indonesia. (Dzakaria, Media Kompas, 2013). Oleh karena itu, di perlukan impor untuk menambah supply beras agar dapat mengontrol harga dasar beras dan gabah pada umumnya. Sesuai hukum ekonomi supply berbanding terbalik dengan harga. Namun hal ini tentu saja mengakibatkan efek yang tidak baik bagi para petani Indonesia. Karena harga beras dalam negeri tidak akan bisa menyamai harga beras impor. Akibatnya, banyak petani yang terlantar akibat berkorban bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu juga karena Bulog kehabisan stok beras. Pada dasarnya produksi beras nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Akan tetapi tidak ada stok cadangan

untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu perlu mengimpor beras untuk menutupi stok cadangan. Hal ini tentu saja akan membuat asumsi lain bahwasanya Indonesia tidak mampu memproduksi beras sendiri dan hanya mengandalkan beras impor dari luar negeri. Itu disebabkan karena kekurangan dan kemampuan sumber daya manusia. Maka untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia juga sangat membutuhkan sumber daya manusia untuk mampu mengolah kekayaan sumber daya alam.

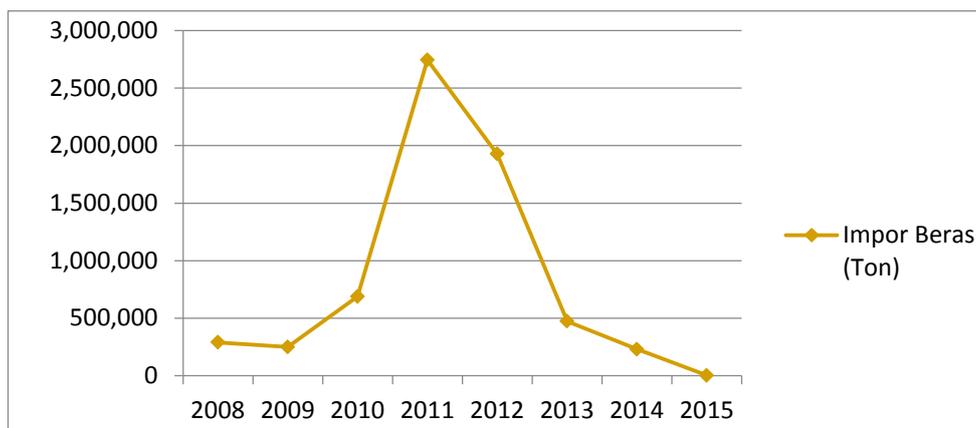
Bila dilihat kembali sejarah yang mendasari hubungan kedua negara, perdagangan beras Vietnam sudah dimulai dari tahun 1984. Persetujuan di berbagai bidang yang telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Industri Perdagangan Vietnam. Telah dilaksanakan pada 18 september 1985, dengan melakukan penandatanganan jangka panjang, Nota Kesepahaman tentang Perdagangan Beras antara kedua Negara. Pada intinya adalah adanya komitmen Pemerintah Vietnam untuk memperpanjang masa penyediaan beras kepada Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu Indonesia memerlukan beras, dalam rangka memenuhi cadangan beras nasional dengan mempertimbangkan kondisi pasokan, kebutuhan, produksi di kedua negara dan tingkat harga beras internasional, maka tidak ada kendala apapun yang patut dapat menahan laju perkembangan hubungan kedua negara di berbagai bidang.

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam didasarkan pada Persetujuan antara pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai kerjasama ekonomi, khususnya pada perpanjangan perdagangan beras yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 21 Nopember 1990. Dasar kerjasama Indonesia-Vietnam di sektor pertanian yaitu telah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) di sektor pertanian pada tanggal 12 Desember 1992 di Hanoi dengan lebih ditekankan pada pemerintah Vietnam mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk komoditi yang ditawarkan oleh pihak Vietnam adalah beras, sementara yang diharapkan dan pemerintah Indonesia adalah Pupuk. Pada periode 1993, Indonesia mengimpor rata-rata 160 ribu ton beras per tahun. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi rata-rata 1,10 juta ton/ pertahun pada periode 1994-1997. Pada masa

krisis 1998-2000 jumlah ini meningkat lagi menjadi 4.65 juta. Walaupun kemudian ada sedikit penurunan, sepanjang 2001-2007, impor beras bertahan di atas 2 juta ton pertahunnya, yang membuat Indonesia praktis selalu berada pada lima besar negara pengimpor beras. (Supadi dalam M Ikhsan Modjo, Kajian Monash Indonesian Islamic Student Westall: 2015).

Krisis pangan yang dihadapi bangsa Indonesia selama ini selalu diatasi dengan melaksanakan kebijakan impor yaitu mengimpor dengan Vietnam. Karena Impor sama dengan membeli, hanya saja uangnya masuk pendapatan negara lain. Indonesia masih mengimpor dari negara tetangga seperti Vietnam, padahal produksi padi Indonesia mengalami surplus. Latar belakang dilakukannya impor beras oleh pemerintah adalah karena beberapa faktor. Di antaranya, karena harga beras dari luar negeri relatif lebih murah dan lebih bermutu daripada beras dari dalam negeri. Kerjasama perdagangan beras antara Indonesia dan Vietnam diadakan pertemuan yang dilakukan di auditorium Kementerian Perdagangan ini telah berlangsung sejak 17 September 2012, diawali dengan pertemuan tingkat Pejabat Senior dimana Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Iman Pambagyo. Di akhir pertemuan, kedua Menteri melakukan penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman tentang Perdagangan Beras antara kedua negara yang intinya adalah adanya komitmen Pemerintah Vietnam untuk memperpanjang masa penyediaan beras kepada Indonesia dari 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2017. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu Indonesia memerlukan beras dalam rangka memenuhi cadangan beras nasional dengan mempertimbangkan kondisi pasokan, kebutuhan, produksi di kedua negara dan tingkat harga beras internasional. Berikut adalah grafik impor beras Indonesia dari Vietnam pada tahun 2008 – 2015 ;

Grafik 1.2 Impor Beras Vietnam 2008 - 2012



(Sumber : BPS – Statistik Indonesia)

Ternyata dari grafik diatas pada tahun 2008 hingga 2011 terjadi peningkatan tajam pada impor beras Vietnam karena pada tahun 2011 sudah terjadi adanya kenaikan harga beras. Kebijakan itu sebagai antisipasi dari kekhawatiran anomali cuaca yang semakin ekstrim di Indonesia. Seharusnya pemerintah segera mengeluarkan langkah antisipatif terhadap kemungkinan adanya lonjakan kenaikan harga beras. Peralnya, beras merupakan faktor utama penyebab naiknya laju inflasi di Indonesia. BPS bahkan menyarankan agar pemerintah mau memanjakan petani selama kondisi anomali cuaca masih terus berlangsung. Hal itu diharapkan bisa merancang petani untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Hal itu satu-satunya cara untuk meningkatkan produksi beras tahun 2011 karena impor beras tidak akan membantu lagi kalau harga internasional dan dalam negeri sudah sama. Tetapi mulai tahun 2012 terjadi penurunan tajam karena adanya lahan pertanian Indonesia yang memiliki kekuatan terlihat pada ketersediaan lahan yang cukup besar, Dari luas daratan Indonesia, terdapat sekitar 94,1 juta ha lahan yang sesuai untuk pertanian tanpa mengganggu keseimbangan ekologis daerah aliran sungai, sedangkan yang sudah dijadikan lahan pertanian baru sekitar 63,7 juta ha (Buku putih Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Hlm.15). Dari data grafik diatas menunjukkan bahwa adanya inflasi dari stok beras pada tahun 2015. Selain lahan yang bertambah diperlukan perubahan kebijakan impor beras

Vietnam. Sehubungan dengan itu, skripsi ini ingin menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap impor beras Vietnam periode 2012 – 2015.

Akan tetapi, Kebijakan impor selalu saja menuai pro dan kontra yang tak terkecuali untuk impor beras yang baru-baru ini disepakati oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia sepakat untuk mendatangkan beras dari Vietnam. Terkait dengan kesepakatan impor beras, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman pun memberikan tanggapan terhadap keputusan tersebut. "Inilah sayangnya pemerintah, produksi digenjot, distribusi digenjot, kita masih impor. Karena apa? Karena pemerintah tak ingin ada kekurangan stok beras," ujar Amran, dikutip detik finance, Selasa (20/10). Bahkan Amran menegaskan bahwa, keputusan impor beras itu tidak datang dari kementeriannya. Sebab, dirinya mengklaim bahwa sebenarnya pasokan beras yang ada bisa mencukupi kebutuhan nasional di tahun ini. Dari 20 Oktober 2014 - 20 oktober 2015 kita tidak ada impor. Produksi kita masih aman sampai Desember. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan peninjauan impor beras dari Vietnam.

Beras ini dimaksudkan untuk cadangan beras di tahun depan, apabila dampak kekeringan panjang dari bencana gelombang panas El Nino, masih berkepanjangan hingga tahun depan. Karenanya, pemerintah pun tak mau berjudi mempertaruhkan stabilitas harga beras dan nasib rakyat. Jika harga beras melonjak, inflasi akan sangat terpengaruh, daya beli masyarakat tergerus, dan kesejahteraan masyarakat pun pasti menurun. Meski demikian, Darmin belum berani memastikan apakah beras dari Vietnam dan Thailand akan segera masuk ke Indonesia. Bila ternyata dampak El Nino tidak sebesar yang dikhawatirkan dan stok beras di dalam negeri masih aman, beras yang diimpor akan dijual lagi ke negara lain. Rencananya soal keputusan final soal impor beras akan dibuat pada November mendatang. Kalau ternyata tidak perlu, tidak perlu kita datangkan, kita jual lagi saja. Kita yakin bisa laku dan tidak akan rugi. Kita tunggu November-Desember.

Pada pernyataan diatas, dapat menyimpulkan adanya pro dan kontra impor beras setiap rezim pemerintahan tetap akan terjadi kekhawatiran terjadi defisit

karena kekurangan supply. Kebijakan impor beras bertujuan untuk mengatasi adanya kekurangan produksi domestik, pemupukan cadangan beras pemerintah dan stok pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Raskin dalam kondisi tidak terpenuhi dari produksi domestik, hal ini kontra produktif dengan upaya pemerintah saat ini dalam mencapai swasembada beras melalui Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai. Dalam banyak kasus khususnya beras masih banyak perdebatan mengenai dampak impor terhadap tingkat kesejahteraan petani. Kelompok yang pro mengatakan bahwa kebijakan impor pada dasarnya justru untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan pertanian. Sebaliknya, kelompok yang menentang adanya kebijakan impor mengatakan bahwa impor pangan di negara berkembang yang menjadikan pertanian sebagai basis ekonomi sering dirugikan atau impor memberikan keuntungan kepada konsumen, namun merugikan petani produsen. Dengan demikian, dampak impor memiliki dua sisi yang kontra produktif, disatu sisi menguntungkan konsumen dan disisi lain merugikan petani produsen.

Hal lainnya menyangkut pro dan kontra masyarakat dalam kebijakan impor, melihat bahwa masalah masyarakat Indonesia dengan konsumsi beras mencapai 139/kg/kapita/tahun. Sehingga Indonesia adalah konsumen terbesar di dunia. Jika kebiasaan makan nasi orang Indonesia dapat dirubah, maka akan berdampak besar pada penurunan konsumsi beras. kebutuhan beras dalam negeri dapat ditekan dengan program diversifikasi pangan yang harus di galakkan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama saat ini. Seperti diketahui bersama bahwa sekitar 80 % kebutuhan karbohidrat orang Indonesia dipenuhi dengan beras. Berikut data jumlah penduduk dan produksi beras.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Indonesia dan Jumlah Produksi Beras Indonesia dari tahun 2008 – 2012

Tahun	Jumlah Penduduk Indonesia (Juta Jiwa)	Jumlah Produksi Beras Indonesia
2008	228,52	34,05
2009	231,37	35,03
2010	237,64	36,9
2011	126,60	38,8
2012	128,40	39

Sumber : Berbagai Sumber diolah oleh Peneliti, 2016

Ada beberapa alasan mengapa banyak kepentingan dalam impor beras, diantaranya adalah: a) Potensi ekonomi sangat tinggi karena keunggulan demografi (penduduk) Indonesia sebesar 255 juta perut yang harus diisi, sehingga peluang ini mengundang banyak kelompok untuk mendapatkan rente yang begitu besar, b) Konsumsi 124,89 kg per kapita/tahun atau lebih dua kali lipat dari konsumsi beras negara-negara OECD 60 kg per kapita/tahun, dan c) Beras merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia yang tak tergantikan oleh pangan lain. Selain itu, dinamika harga beras di Indonesia dalam 5 tahun terakhir sangat membingungkan, ditengah-tengah harga beras dunia turun 25 persen, pada saat yang sama harga beras domestik naik 52 persen, dan bayangan El Nino menurut sebagian ahli memperkirakan ancaman kekeringan tidak akan sampai ke Indonesia dan tidak akan mempengaruhi standing crop padi di Indonesia. Hal ini menjadi alasan berbagai kalangan yang menyarankan pemerintah untuk memperkuat cadangan dan stok berasnya, baik melalui pengadaan dalam negeri atau dari impor.

Apabila pemerintah tidak dapat memprediksikan apakah perekonomian akan mengalami masa resesi dalam waktu enam bulan sampai satu tahun, pemerintah tidak akan dapat mengevaluasi apakah kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara makro atau tidak (Mankiw, 2007; 399). Walaupun ketersediaan beras sudah mengarah pada pertumbuhan produksinya namun masih cenderung terjadi percepatan pertumbuhan produktivitas pertanian yang melambat dan dalam kondisi perdagangan bebas. Dalam kondisi yang demikian, produk beras Indonesia ini bersaing dengan komoditas impor (Saktyanu, 2012). Ada tiga alasan perlu atau tidaknya Indonesia mengimpor beras, yang pertama adalah ketercukupan beras dalam negeri. Dia menyebutkan apabila tidak ingin melakukan impor, maka produksi dalam negeri harus mencukupi. Yang kedua apabila produksi beras mencukupi maka harga akan terjamin stabil. Dan yang ketiga adalah faktor stok yang ada di pemerintah. Stok ini harus seimbang dimana jumlah permintaan dan ketersediaan beras tidak terlalu jauh drastis (Desiane, 2014). Produksi beras di Indonesia belum dapat memenuhi permintaan masyarakat sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan impor beras guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia akan beras. Banyaknya impor beras Indonesia digambarkan dalam tabel berikut.

Table 2 Impor Beras Indonesia Tahun 2013

Negara	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (US\$)
Vietnam	1.780	946,5
Thailand	938,7	533
Cina	4,7	15,5
Pakistan	18,4	12,4
Lainnya	10,2	5,8

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan di negeri sendiri, sehingga pemerintah perlu untuk melakukan impor beras guna mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Pada data diatas, Vietnam adalah Negara yang paling unggul dalam mengekspor beras ke Indonesia. Hampir semua beras yang di konsumsi masyarakat Indonesia adalah beras dari Vietnam. Latar belakang dilakukannya impor beras Vietnam oleh pemerintah adalah karena beberapa faktor di antaranya karena harga beras dari luar negeri relatif lebih murah dan lebih bermutu daripada beras dari dalam negeri, kondisi iklim Indonesia kurang kondusif dan faktor pendukungnya kurang kondusif untuk mendorong laju pertumbuhan produksi. Namun hal ini sangatlah tidak baik, karena dapat mematikan pasaran produk dalam negeri.

Keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras menuai kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan di daerah, mulai dari petani, LSM, mahasiswa dan tanpa terkecuali juga dari aparatur Negara. Mereka yang menolak, khawatir impor beras akan semakin menggelamkan kehidupan petani yang terpuruk. Di sisi lain, hal itu menunjukkan tidak adanya program pembangunan yang konkret terhadap sektor pangan (kementan,2013). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan impor beras yang dituangkan penulis dengan Fokus dalam penelitian ini adalah Indonesia sebagai Negara agraris yang notabene merupakan Negara dengan lahan pertanian yang melimpah ruah justru melakukan kegiatan impor beras yang dari tahun ke tahunnya melonjak naik turun.

1.2 Rumusan Permasalahan

Pangan merupakan isu yang sangat sensitif, peran pemerintah sangat besar dalam menentukan bagaimana mekanisme yang berlangsung dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Peran pemerintah selalu ada dalam setiap proses, mulai dari produksi dan pengadaan, distribusi hingga di tingkat konsumsi. Tentu saja permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia bukan semata ketersediaan atau akses terhadap kebutuhan pangan. Selain tingkat persediaan atau kemudahan akses di setiap daerah masih berbeda-beda, situasi saat ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan bukan satu-satunya tantangan.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Penulis menjadikan Pertanyaan Penelitian yang akan Penulis bahas adalah : “ Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam penurunan impor beras Vietnam periode 2015 ? ” .

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan bisa mengetahui :

1. Menjelaskan kondisi komoditi beras Indonesia.
2. Menganalisa dinamika impor beras Indonesia – Vietnam.
3. Menganalisa Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap impor beras Vietnam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini membuat suatu yang diharapkan agar :

1. Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan serangkaian informasi dan penjelasan dalam mengkaji Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap impor beras Vietnam 2012 – 2015.
2. Akademis : Dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi, pembelajaran dan pertimbangan bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), terutama dalam kajian Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap impor beras Vietnam 2012 - 2015.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Teori Perdagangan Internasional

Teori Perdagangan Menurut david richardo adalah hubungan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Hal tersebut bisa saja antar perorangan, individu denan individu, individu dengan pemerintah negara lain, atau bahkan pemerintah sesuatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan Internasional ini juga merupakan hubungan kegiatan ekonomi yang diwujudkan dalam proses

pertukaran barang atau jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan antar negara masing – masing.

Hubungan Perdagangan Internasional ini juga merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan Gross Domestic Product (GDP), serta mendorongnya kemajuan transportasi, globalisasi, industrialisasi dan kehadirannya perusahaan multinasional. Perdagangan Internasional ini mempunyai batas – batasan politik dan kenegaraan yang dapat mempersulit perdagangan seperti perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, serta hukum dalam Perdagangan Internasioanal.

Teori Perdagangan Internasional dapat dijelaskan dengan teori *Comparative Advantage Theory* (Teori keunggulan komparatif). Teori keunggulan komparatif pertama kali diperkenalkan oleh David Richardo, karena itu biasa disebut juga sebagai prinsip keunggulan komparatif Ricardian. Dalam teori Richardo, merasa kurang puas dengan teori Adam Smith, kemudian diperbaiki dengan mengajukan dua perbedaan dalam perdagangan. (<http://lms.unhas.ac.id/2005/09> Maret 2014. Pkl 16.00)

- Perdagangan dalam negeri
- Perdagangan luar negeri

Manfaat Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut : Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, banyak faktor – faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor – faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya Perdagangan Internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. (<http://lms.unhas.ac.id/2005/09> Maret 2014. Pkl 16.00)

1.5.2 Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan menurut Syarief Hidayat adalah merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan. (Syarief Hidayat, Kajian Ketahanan Pangan, 2015).

Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu ke waktu. Sumber penyediaan pangan diwujudkan berasal dari produksi dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan pangan. Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan keseluruhan wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan distribusi pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi darat, laut dan udara yang sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusian pangan. Cadangan pangan nasional diwujudkan dengan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan

pemerintah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Ketahanan pangan diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Selanjutnya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Untuk menjawab rumusan permasalahan, penelitian ini perlu melakukan tinjauan terhadap karya akademis yang memiliki kemiripan dan atau berhubungan dengan penelitian ini. Berikut beberapa karya akademis :

Buku karya Nini Rossi Prabowo (Ilmu Pertanian, MMA-UGM Yogyakarta 2012) dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia.”

Pada buku ini menjelaskan mengenai keunggulan utama yang harus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, Indonesia mempunyai potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian, Kedua, sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan yang mata pencahariannya di sektor pertanian. Ketiga, perlunya induksi teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan yang dirancang untuk mengembangkan pertanian tanpa mengakibatkan kerusakan. Keempat, tersedianya tenaga kerja sektor pertanian yang cukup melimpah. Kelima, ancaman kekurangan bahan pangan yang dapat dipenuhi sendiri dari produk dalam negeri, sehingga

tidak harus tergantung pada produk -produk pertanian luar negeri yang suatu ketika harganya menjadi mahal. Untuk jangka panjang kebijakan pembatasan impor tersebut dapat dikurangi secara bertahap namun kebijakan peningkatan produksi domestik masih diperlukan yang disertai pula dengan peningkatan Ketahanan Pangan Domestik/Lokal.

Selain itu dijelaskan juga bahwa Indonesia merupakan negara yang bergantung pada impor beras untuk memenuhi kebutuhannya yang terus meningkat. Hal ini di pengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia yang menempatkan Indonesia pada salah satu negara yang mempunyai posisi teratas dalam jumlah penduduk. Pemerintah Indonesia berencana untuk impor beras dan memastikan ketersediaan stok beras di dalam negeri. Sebelumnya, Indonesia berniat untuk tidak impor karena ada prediksi kenaikan produksi panen tahun ini. Kebijakan yang dipilih pemerintah untuk membuka kran Impor mendatangkan kontra, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, tentang Kebijakan Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah yang mengizinkan impor beras menimbulkan pertanyaan yang sangat besar, apalagi keputusan importasi beras tersebut berlangsung ketika terjadi kenaikan harga beras. Kebutuhan beras pada tahun 2014 sebesar 33.013.214 ton, maka apabila harus ada surplus 10 juta ton sebagai cadangan, berarti harus ada produksi beras minimal 43 juta ton. Bila produksi beras tidak memenuhi kebutuhan pangan nasional, maka pemerintah harus melakukan impor. Oleh karena itu, pemerintah mengimpor sebagian besar pangan beras dari luar negeri yang merupakan eksportir beras di bidang pangan dan melakukan kerja sama dengan negara penghasil beras yaitu Vietnam.

Melalui pada buku tersebut, dapat membedakan skripsi ini yang hanya menjelaskan secara luas mengenai sektor pertanian saja. Skripsi ini lebih memfokuskan terhadap menurunnya impor beras Vietnam pada tahun 2012 – 2015 dan lebih meluasnya lahan pertanian. Sedangkan buku tersebut lebih banyak menjelaskan mengenai kenaikan produksi panen secara bertahap.

Laporan Karya Rudi Supriyanto (Kementerian Perdagangan RI, Jakarta. 2012) dengan judul “Laporan Kebijakan Indonesia dengan Vietnam MOU on Rice Trade”

Laporan ini menjelaskan mengenai hubungan bilateral Indonesia - Vietnam dan hubungan perdagangan kesempatan bagi kedua negara untuk mempertahankan kedudukan perekonomian. Kebijakan Indonesia terhadap impor beras Vietnam, pangan beras dalam kehidupan sehari – hari pada masyarakat agar dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan pangan beras di Indonesia. Lalu, strategi Indonesia tidak terus bergantung pada salah satu Negara ASEAN yaitu Vietnam. Indonesia merupakan negara yang bergantung pada impor beras, untuk memenuhi kebutuhannya yang terus meningkat. Hal ini di pengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia yang menempatkan Indonesia pada salah satu negara yang mempunyai posisi teratas dalam jumlah penduduk.

Pemerintah Indonesia berencana untuk impor beras dan memastikan ketersediaan stok beras di dalam negeri. Sebelumnya, Indonesia berniat untuk tidak impor karena ada prediksi kenaikan produksi panen tahun ini. Kebijakan yang dipilih pemerintah untuk membuka kran Impor mendatangkan kontra, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, tentang Kebijakan Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah yang mengizinkan impor beras menimbulkan pertanyaan yang sangat besar, apalagi keputusan importasi beras tersebut berlangsung ketika terjadi kenaikan harga beras. Oleh sebab itu kedua Negara meningkatkan kerjasama guna memperbaiki perekonomian masing-masing Negara. MoU yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak antara lain berisi mengenai poin perjanjian kerjasama ekonomi di sektor pertanian.

Dalam kebijakan ketahanan pangan pemerintah indonesia, MoU tersebut menerangkan bahwa pentingnya hubungan kerjasama jangka panjang dan proyek-proyek ekonomi bersama saling menguntungkan rakyat mereka. Dan kesempatan yang telah di sepakati adalah kedua negara akan bekerja sama dengan tujuan untuk meningkatkan dan membangun hubungan abadi di sektor pertanian termasuk dengan undang - undang dan peraturan yang berlaku. Bidang kerjasama antara kedua belah pihak terbatas, namun tidak terbatas pada bidang kerjasama kegiatan sarana dan prasarana hulu dan hilir, mendorong dan mempromosikan investasi dan kerjasama langsung antara faktor pihak atau melalui perusahaan afiliasi mereka, meningkatkan kapasitas kerjasama termasuk kerjasama yang lebih

erat antara penelitian dan pusat-pusat pelatihan dan mengintensifkan kunjungan pejabat, dan transfer teknologi melalui pelaksanaan penelitian terapan dan kegiatan pembangunan dan instalasi fasilitas demonstration dan daerah lainnya yang dapat disepakati.

Dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam untuk kerjasama ketahanan pangan pemerintah Indonesia dengan melakukan *Joint Working Group* sebagai langkah kebijakan ketahanan pangan yang di tandatangannya MoU kerjasama bilateral Indonesia - Vietnam pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras bagi rakyat dan mencapai peluang dan keuntungan bagi kedua negara. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) kerjasama bidang pertanian antara kedua negara yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1992 di Hanoi. Memperhatikan kepentingan bersama kedua negara dalam mengembangkan sumber pangan dan investasi yang terkait dengan sumber daya tersebut bersama dengan teknologi baru, Sebagaimana di ketahui bahwa MoU yang telah di tandatangani oleh kedua negara berisi tentang perjanjian yang notabennya akan saling menguntungkan satu sama lain. Setelah di sepakatinnya *Momerandum of Understanding* oleh kedua negara lalu di tindak lanjuti dengan pertemuan *joint working group* di bidang pertanian sebagai kebijakan kerjasama ketahanan pangan Indonesia terhadap impor beras Vietnam.

Sehubungan dengan laporan tersebut, yang dapat membedakan pembahasan dari skripsi ini adalah pada laporan itu menyebutkan bahwa peningkatan konsumsi pangan Indonesia yang memaksa pemerintah. Untuk berusaha memenuhi kebutuhan pangan beras rakyat dengan impor beras jangka panjang. Sedangkan skripsi ini meneliti kebijakan atau strategi Indonesia untuk bisa melepas ketergantungan pangan beras pada negara di ASEAN. Pada buku tersebut, terdapat data MoU yang ingin peneliti ambil. Seperti, kebijakan Indonesia dengan Vietnam sesuai dengan data pada skripsi ini.

Jurnal karya C. Sage. (*Internasional food policy Research Institute Technical Guide, Washington D.C. 2012*) dengan judul “*The Government of Indonesia*

and Vietnam agreed to increase private investment, especially to ensure the availability of food.”

Jurnal ini menjelaskan mengenai Volume perdagangan Indonesia dan Vietnam akan ditingkatkan. Sebagaimana Pemerintah tidak mulai membuat perencanaan jangka panjang soal pengadaan beras maka pangan di dalam negeri akan terus bermasalah karena beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Pemerintah mengajak masyarakat agar melakukan diversifikasi pangan sehingga tidak terus bergantung pada beras. Maka pemerintah selalu mengimpor padahal langkah tersebut tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Indonesia dan Vietnam yang sudah tanda tangani 800, kontrak dari Vietnam 500 ribu ton kemudian dari Thailand 300 ribu ton, realisasinya sampai dengan September ini 200 ribu ton lebih, terus sampai dengan Desember ini, Kalangan pengamat juga menilai, kebijakan pemerintah mengimpor beras bertolak belakang dengan semangat pemerintah ingin swasembada beras dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun kedepan. Dari total rencana impor beras sebanyak 800 ribu ton tahun ini, 200 ribu ton diantaranya sudah datang dan sisanya akan dituntaskan hingga akhir tahun. Dinamika harga beras di Indonesia dalam 5 tahun terakhir sangat membingungkan. Kelompok yang Pro mengatakan bahwa kebijakan impor pada dasarnya justru untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan pertanian. Sebaliknya, kelompok yang Kontra kebijakan impor mengatakan bahwa impor pangan di negara berkembang yang menjadikan pertanian sebagai basis ekonomi sering dirugikan atau impor memberikan keuntungan kepada konsumen, namun merugikan petani produsen.

Dengan demikian, jurnal tersebut lebih memfokuskan dampak impor memiliki dua sisi yang kontra produktif, disatu sisi menguntungkan konsumen dan disisi lain merugikan petani produsen. Diperlukan impor beras untuk menutupi defisit produksi domestik. Jurnal tersebut dapat di ambil datanya untuk skripsi ini, pada dampak impor tersebut tetapi perbedaan dari skripsi ini dengan buku tersebut adalah tidak menjelaskan lebih banyak mengenai kontra yang produktif pada impor beras Vietnam.

1.7 Alur Pemikiran



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, dibahas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini mencoba menggambarkan fenomena pada Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap impor beras Vietnam periode 2012 – 2015.

Jenis data dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk dapat menganalisa fenomena tersebut.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer : Dilakukan dengan cara melakukan kegiatan riset seperti wawancara. Berupa hasil wawancara dan dokumen resmi yang dikeluarkan dengan pihak terkait di Departemen Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI dan kajian keperpustakaan dimana menggunakan sumber-sumber bahan bacaan serta data-data yang tertulis melalui dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, surat kabar, artikel dan juga internet.

2. Data sekunder : Dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature, mengumpulkan data dan informasi dari buku mengenai teori ataupun artikel online dan website.

1.8.3 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis atau fenomena yang terjadi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis. Sehingga suatu permasalahan di jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang ditemukan berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Analisis data dilakukan sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan agar data yang diperoleh dari pengamatan dapat dijelaskan secara jelas. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang kemudian diklasifikasi dan dikumpulkan untuk digunakan dalam proses penyusunan penelitian serta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Pembabakan

Dibawah ini merupakan sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada pada penelitian:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERJASAMA INDONESIA DAN VIETNAM DALAM KOMODITAS BERAS.

Bab kedua akan membahas mengenai dinamika kerjasama perdagangan Indonesia terhadap impor beras Vietnam.

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENURUNAN IMPOR BERAS VIETNAM.

Bab ketiga akan membahas mengenai bagaimana bentuk kebijakan pemerintah Indonesia terhadap impor beras Vietnam.

BAB IV PENUTUP.

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut

